

Judul : Soal OTT, Penyadapan & Sitaan : DPR Bentak-Bentak KPK
Tanggal : Rabu, 27 September 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 & 9

SOAL OTT, PENYADAPAN & SITAAAN DPR Bentak-bentak KPK

RAPAT dengar pendapat (RDP) Komisi III bersama KPK berlangsung panas. Rapat yang beroma Pansus Angket KPK ini kembali menyoal operasi tangkap tangan (OTT), penyadapan hingga sitaan. Tidak hanya kritik pedas, empat pimpinan komisi antirasuah juga diceramahi dengan nada tinggi. Bahkan, ada yang membentak-bentak.

Disebut aroma Pansus karena anggota komisi hukum ini kebanyakan anggota Pansus. Di antaranya, Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar, Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP, Mukhammad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar dan Arteria Dahlan anggota Fraksi PDIP. Pimpinan KPK tidak sekalipun datang ke Pansus Angket dengan landasan menunggu putusan juridicial review Mahkamah Konstitusi (MK) soal itu.

Tidak habis akal, DPR menggunakan mitra kerja KPK, Komisi III DPR untuk bertemu langsung pimpinan KPK melalui RDP. Bahkan, rotasi dilakukan untuk menggenapi anggota Pansus. Yaitu, Misbakhun (Golkar) dari Komisi X, John Kennedy Aziz dari Komisi VIII.

Dengan demikian, lengkap su-

dah anggota pansus angket KPK dari fraksi Golkar di rapat Komisi III ini. Sementara Agun Gunandjar, Bambang Soesatyo, dan Adies Kadir memang personel pansus di Komisi III.

Nah, di rapat kemarin, sidang mengerucut kepada tiga persoalan. Yaitu, OTT, penyadapan dan barang sitaan. Dimulai dari OTT, di mata beberapa anggota Komisi III DPR, OTT menyisakan banyak persoalan. Jika pencegahan korupsi berjalan efektif maka OTT bisa jadi tidak banyak terjadi. "Atas dasar apa bapak melakukan OTT, sehingga kami tidak menyangka bahwa bapak melakukan tebang pilih. Kenapa yang lain tidak di-OTT? Siapa yang mengontrol dan mengawasi, apakah salah satu dari komisioner mengawasi? Ini namanya pengebakan," tegas anggota Komisi III, Arteria Dahlan.

Dengan nada tinggi dan terkesan membentak-bentak, politisi PDIP ini mengkritik tindakan OTT yang dilakukan KPK selama ini. "Mungkin kami bodoh, tapi tidak idiot. Masa OTT pencegahan?

◆ BERSAMBUNG KE HAL 9

KPK: DPR Jangan Takut Disadap

DPR Bentak-bentak
... DARI HALAMAN 1

Namanya operasi, bukan pencegahan,” tegasnya. “Ini bukan OTT, ini penjeblakan, bukan karena KPK banyak menangkap orang. Jadi bukan karena KPK menangkap enam orang ini sukses, ini KPK gagal dalam pencegahan,” tegasnya lagi.

Hal senada disampaikan politisi PKS, Nasir Djamil. Pria asal Aceh ini beranggapan OTT tidak bisa menghilangkan tindakan koruptif, hanya bersifat meredakan sementara. Bahkan dia menganalogikan OTT seperti obat sakit kepala yang dapat dibeli di warung.

“OTT itu seperti orang minum paracetamol, hanya meredakan tidak menyembuhkan. Saya katakan bukan berarti saya tidak menghargai. Saya nilai OTT itu hanya orang yang sakit kepala minum obat, tapi hanya meredakan, tidak menyembuhkan,” papar Nasir.

Dihujani kritik, KPK tetap tenang.

Empat komisioner hadir yaitu Ketua KPK Agus Rahardjo dan tiga wakilnya, Laode M Syarief, Basaria Pandjaitan dan Alexander Marwata.

Alexander Marwata mengatakan, maraknya OTT KPK belakangan ini bukanlah prestasi lembaganya. “Itu bukan prestasi buat KPK. Bagi kami, itu tragedi, tapi kami harus tindaklanjuti laporan masuk. Apakah terus OTT? Tidak. Upaya pencegahan kita lakukan, tapi tak mengurangi upaya penindakan,” tuturnya.

Selanjutnya, persoalan kemampuan penyadapan yang dilakukan KPK juga dipersoalkan. Anggota dewan Arteria Dahlan lagi-lagi tampil bersemangat. Dia menuding, hak KPK ini bisa dilakukan di luar kasus rasuah. “Jangan sampai ini kita pikir ada penyadapan yang sah dan tidak sah. Takut kita. Jangan-jangan saya disadap. Kita nggak tahu melalui yang tidak resmi (sah),” ujar Arteria.

Anggota dewan Aboe Bakar Al-habsyi menyatakan dalam masalah

penyadapan itu, yang paling banyak dipertanyakan soal legal standingnya. “Karena hal ini dianggap paling mudah melanggar HAM,” tegasnya.

Namun, Laode M Syarif menegaskan pihaknya tidak melakukan OTT serampangan. “Yang saya heran, kenapa selalu kewenangan penyadapan yang dari KPK saja yang dipermasalahkan? Yang lain tidak pernah,” ujarnya. Soal ketakutan dewan disadap KPK, Syarif mengatakan jangan takut. Saat menyadap, KPK harus melalui 5 tahapan sebelum dapat menggunakan kewenangan tersebut.

Poin ketiga yang menjadi perhatian Komisi III adalah soal barang sitaan. Wakil dari PDIP, Masinton Pasaribu sempat menagih surat list barang sitaan KPK kepada pimpinan KPK. List barang sitaan ini sempat diminta oleh Komisi III saat RDP beberapa waktu lalu dengan KPK.

Selain itu Masinton juga menagih SOP bidang penindakan KPK yang belum diserahkan. Permintaan Masin-

ton tersebut dibenarkan Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman. Benny mengatakan daftar barang sitaan dan SOP bidang penindakan KPK menjadi hal yang diputuskan dalam rapat sebelumnya.

Sempat terjadi tarik ulur dalam proses ini. Laode M Syarif mengatakan daftar barang sitaan belum dapat diberikan karena terkait dengan proses penyidikan KPK. Namun, yang sudah inkrah bisa diserahkan.

Sempat terjadi silat lidah di sini. Benny mengatakan jika sidang di pengadilan terbuka untuk umum dan melampirkan segala sesuatunya. Laode Syarif menjawab dan mengatakan dapat menyerahkan data barang rampasan perkara. “Kami siap menyerahkan data barang rampasan perkara,” sebut Laode Syarif. Namun, tak lama berselang, Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan sebuah file berisi list barang sitaan kepada pimpinan Komisi III. ■ BSH